

Penghitungan Kemiskinan Multidimensi

Mokhamad Haris

Mahasiswa Magister Ilmu Adm Publik-FIA, Universitas Brawijaya

Abstract: Poverty is not just economic issues, but it is a complex and multidimensional problem. Therefore, we need a multidimensional poverty indicators (covering various dimensions of life) as a complement unidimensional poverty indicator (economic dimension) that had been used officially in various countries, including Indonesia. Preparation of multidimensional poverty indicators is done by identifying the dimensions of life that was instrumental in the process of utilization of human beings in the face of poverty. The dimensions are also adjusted and should be relevant to the demands of development, both in the regional context, in line with the ideals of the national government, as well as the demands of international development (SDGs). The method used in the calculation of multidimensional poverty index is Alkire-Foster's method.

Keywords: Alkire-Foster, multidimensional poverty, MPI, SDGs

Abstrak: Kemiskinan bukan hanya sekadar permasalahan ekonomi, namun merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Oleh karenanya, diperlukan suatu indikator kemiskinan yang multidimensional (mencakup berbagai dimensi kehidupan) sebagai penyempurna indikator kemiskinan unidimensi (dimensi ekonomi) yang selama ini telah digunakan secara resmi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penyusunan indikator kemiskinan multidimensi dilakukan dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi kehidupan yang sangat berperan dalam proses pendedayagunaan manusia dalam menghadapi kemiskinan. Dimensi-dimensi tersebut juga disesuaikan dan harus relevan dengan tuntutan pembangunan, baik dalam konteks kedaerahan, sejalan dengan cita-cita pemerintah nasional, maupun tuntutan pembangunan internasional (SDGs). Metode yang digunakan dalam penghitungan indeks kemiskinan multidimensi adalah metode Alkire-Foster.

Kata Kunci: Alkire-Foster, kemiskinan multidimensi, MPI, SDGs

Studi ilmu administrasi publik merupakan salah satu percabangan ilmu pengetahuan yang berfokus pada serangkaian aktivitas terencana yang dilakukan secara bersama-sama melalui tata kelola pemerintahan guna memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu wujud nyata dampak dari adanya pelayanan publik yang baik adalah meningkatnya kesejahteraan publik. Oleh karenanya, setiap kegiatan perencanaan atau kebijakan publik, mulai dari perumusan perencanaan, implementasi perencanaan, sampai dengan evaluasi hasil kebijakan publik harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan publik. Indikator utama untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan publik dapat dilihat dari tingkat kemiskinan masyarakatnya.

Kemiskinan memang merupakan permasalahan klasik yang selalu menghantui pembangunan di belahan dunia manapun. Setiap daerah dan negara selalu berusaha dan berlomba-lomba untuk memerangi kemiskinan yang melingkupi masyarakatnya. Oleh karenanya, dalam menyusun sebuah formulasi perencanaan

pembangunan untuk memerangi kemiskinan, perlu didukung dengan pengidentifikasian akar permasalahan yang menjadi penyebab utama kemiskinan. Ketersediaan data, informasi, serta analisis yang akurat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kemiskinan tentu sangat relevan dan diperlukan, sehingga perencanaan penanggulangan kemiskinan ke depannya diharapkan dapat lebih optimal dan efektif.

Sudah sejak puluhan tahun silam para ahli sepakat dan menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak dapat hanya dipandang sebagai permasalahan satu sisi tertentu, melainkan ada banyak dimensi yang terlibat di dalamnya. Namun sayangnya, kesimpulan tersebut hanya berhenti pada tataran teori dan masih belum diimplementasikan secara nyata dalam melakukan evaluasi aktivitas pembangunan. Meskipun metode penghitungan indikator kemiskinan multidimensi telah diperkenalkan oleh Alkire dan Foster melalui *Oxford Poverty & Human Development Initiative* (OPHI) sejak tahun 2010, namun sampai dengan saat ini, baik secara nasional di Indonesia maupun secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), indikator kemiskinan yang digunakan untuk melakukan evaluasi pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah indikator kemiskinan unidimensional, yang memandang bahwa kemiskinan hanya sebatas permasalahan satu dimensi, yakni dimensi ekonomi saja.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan metode penghitungan indeks kemiskinan multidimensi yang diadopsi dari OPHI (2011), namun telah disesuaikan dan relevan bagi daerah-daerah di Indonesia. Secara tidak langsung, kajian ini juga mendorong pihak-pihak yang selama ini berwenang dalam penentuan, penghitungan, hingga pemanfaatan data dan informasi mengenai indikator kemiskinan makro di Indonesia untuk mulai mempertimbangkan penggunaan indikator kemiskinan multidimensi sebagai salah satu bahan evaluasi pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang salah satu tujuannya adalah memerangi kemiskinan multidimensi (BPS, 2014).

Tinjauan Pustaka

Konsep dan teori tentang kemiskinan sangat banyak dan beragam, mulai dari yang dikemukakan oleh para ahli, lembaga/instansi pemerintah, hingga badan-badan internasional, seperti *World Bank*. Namun secara garis besar, cara pandang terhadap permasalahan kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan unidimensi dan kemiskinan multidimensi. Kemiskinan unidimensi merupakan kemiskinan yang diukur atau dilihat hanya berdasarkan satu dimensi, yakni dimensi ekonomi (moneter). Kemiskinan unidimensi hanya memandang fenomena kemiskinan dari sisi kemampuan pendapatan atau pengeluaran (konsumsi). Angka kemiskinan resmi secara global di berbagai negara, termasuk Indonesia dan *World Bank* sampai dengan saat ini masih mengacu pada kemiskinan unidimensi.

World Bank menggunakan pendekatan pendapatan untuk menentukan kemiskinan, di mana seseorang dengan rata-rata pendapatan per kapita per hari di bawah \$ 1,25-2 PPP (*purchasing power parity*) dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sementara di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi

pemerintah yang berwenang melakukan penghitungan angka kemiskinan resmi, menggunakan pendekatan pengeluaran. Seseorang yang rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah standar *basic needs* riil yang ditentukan (Garis Kemiskinan atau GK) dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ada tiga indikator kemiskinan yang biasanya disajikan, yaitu: persentase penduduk miskin (*headcount index*), indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*), dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Ketiganya biasa dikenal dengan FGT-index, karena dirumuskan oleh Foster, Greer, dan Thorbecke (Ravallion, 1998).

Sementara itu, kemiskinan multidimensi merupakan kemiskinan yang dilihat atau diukur dari banyak dimensi (aspek). Konsep mengenai kemiskinan multidimensi sudah sejak lama digagas oleh Amartya Sen melalui berbagai tulisannya, yakni sekitar pertengahan dekade 1980an. Salah satu tulisan Sen mengenai kemiskinan multidimensi dituangkan dalam bukunya "*Development as Freedom*" (1999) yang menyatakan bahwa pendapatan (*income*) bukanlah instrumen satu-satunya untuk menentukan kemampuan (*capability*) seseorang. Menurut Sen (1999), ada sisi-sisi lain yang mengalami deprivasi, yang perlu mendapatkan perhatian sama besarnya dengan perhatian terhadap permasalahan pendapatan dalam memahami kemiskinan. Sisi-sisi lain tersebut di antaranya adalah: pengangguran, kesehatan, pendidikan, hak asasi, kebebasan, dan berbagai variabel sosial lainnya. Pemikiran Sen inilah yang kemudian diaplikasikan melalui penelitian Alkire dan Foster dari OPHI (2011), yang kemudian melahirkan *Multidimensional Poverty Index* (MPI). Dalam MPI, ada tiga angka yang biasanya disajikan, yaitu:

- (i) persentase penduduk miskin multidimensi (*headcount ratio* atau H), menggambarkan seberapa banyak penduduk yang mengalami miskin multidimensi di suatu daerah;
- (ii) intensitas kemiskinan multidimensi (A), menggambarkan seberapa banyak dimensi yang terdeprivasi. Semakin besar nilai A menunjukkan semakin banyak dimensi yang terdeprivasi, yang berarti pula semakin kompleks permasalahan kemiskinan di daerah tersebut;
- (iii) indeks kemiskinan multidimensi (MPI), menggambarkan tingkat kemiskinan multidimensi secara keseluruhan di suatu daerah.

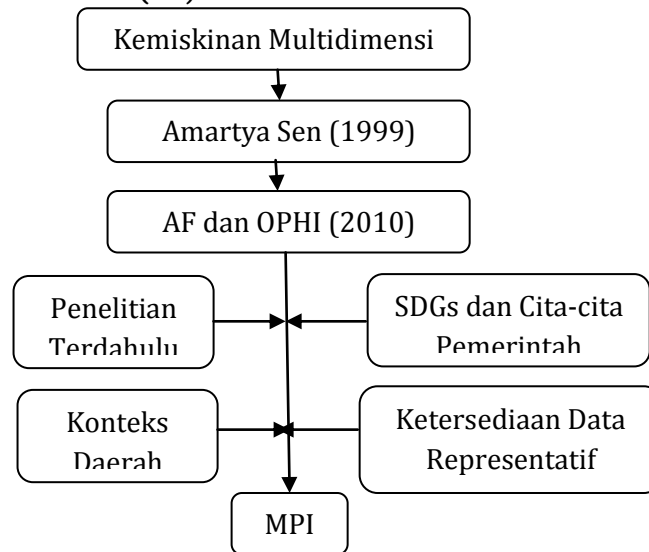
Penelitian tentang MPI di luar negeri sudah dilakukan beberapa kali, dan bahkan sudah diaplikasikan di beberapa negara seperti Tiongkok, Kolombia, Malaysia, Bhutan, India, dan Brasil. Masing-masing peneliti dan negara menggunakan dimensi dan indikator yang sedikit berbeda dengan konsep MPI awal yang diusung oleh Alkire-Foster (AF). Hal ini untuk menyesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada di negara atau daerahnya masing-masing. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan pengukuran kemiskinan multidimensi dengan metode AF, di mana setiap daerah/negara bisa melakukan modifikasi dimensi dan indikator MPI sesuai kondisi daerah/negaranya masing-masing.

Di Indonesia, penelitian tentang MPI pernah dilakukan oleh Hanandita dan Tampubolon (2015) dan Prakarsa (2015). Hanandita dan Tampubolon (2015) menggunakan dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan

Prakarsa (2015) menggunakan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Pembahasan

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan MPI ini menggunakan *raw data* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Hal ini karena data Susenas sudah tersedia lengkap dan secara komprehensif memuat semua jenis data pada dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang diperlukan. Data Susenas juga sangat besar sehingga bisa dilakukan estimasi sampai tingkat kabupaten/kota dan memiliki series waktu yang panjang, sehingga dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Sedangkan, metode yang digunakan untuk penghitungan MPI mengacu pada formula Alkire Foster (AF).



Gambar 1 Kerangka Pikir Kemiskinan Multidimensi

Berangkat dari berbagai konstruksi pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan pada Tinjauan Pustaka, maka dilakukanlah kajian ini sehingga dapat lebih memperbaiki dan melengkapi penghitungan kemiskinan multidimensi di Indonesia, baik dari sisi dimensi dan indikator yang digunakan maupun argumentasi yang menjadi justifikasi atas penggunaan dimensi dan indikator tersebut. Alur kerangka pikir penyusunan MPI dalam kajian ini disajikan dalam Gambar 1 di atas.

Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 1 di atas, selanjutnya dirumuskan dimensi dan indikator MPI beserta *cut-off* dan justifikasinya masing-masing sebagai berikut.

1. Dimensi ekonomi

Hanya ada satu indikator pada dimensi ekonomi, yaitu rata-rata konsumsi per kapita per bulan. Rumah tangga yang rata-rata konsumsi per kapita per bulannya di bawah standar basic needs riil yang disesuaikan (GK kabupaten/kota BPS) dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria deprivasi

ini mengacu pada modifikasi terhadap Tujuan 1 Target 1A Indikator nomor 1 SDGs.

2. Dimensi kesehatan

a) Gizi

Indikator pertama pada dimensi kesehatan adalah gizi. Rumah tangga yang asupan gizinya di bawah standar minimum Angka Kecukupan Gizi (AKG) Nasional dikatakan terdeprivasi pada indikator gizi. Kebutuhan AKG seseorang diproksi melalui angka kebutuhan kalori minimum per kapita per hari sebesar 2.150 kkal dan angka kebutuhan protein minimum per kapita per hari sebesar 57 gram. Kriteria deprivasi ini berdasarkan pada Tujuan 2 Target 2A Indikator nomor 7 SDGs dan Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2013.

b) Penolong persalinan

Indikator kedua pada dimensi kesehatan adalah penolong persalinan. Rumah tangga yang sedang memiliki balita yang proses persalinannya ditolong oleh tenaga nonmedis (dukun bersalin, famili/keluarga, dan lainnya) dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria deprivasi ini sebagai pengganti variabel kematian anak yang datanya tidak tersedia lengkap hingga ke setiap kabupaten/kota, serta mengacu pada standar penolong persalinan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

3. Dimensi pendidikan

a) Partisipasi sekolah

Indikator pertama pada dimensi pendidikan adalah partisipasi sekolah. Rumah tangga yang sedang memiliki anak usia SD/ sederajat hingga SMA/SMK/ sederajat (7-18 tahun), tetapi sudah tidak bersekolah lagi dan tidak menamatkan wajib belajar 12 tahun (tidak memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat) dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria deprivasi ini mengacu pada program wajib belajar 12 tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawa Cita poin 5.

b) Pendidikan prasekolah

Indikator kedua pada dimensi pendidikan adalah pendidikan prasekolah. Rumah tangga yang mempunyai anak usia 5-6 tahun tetapi tidak pernah mengakses layanan pendidikan anak usia dini, seperti TK/BA/RA, Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD, PAUD-BKB, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIAK, TKQ, dsb, dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria deprivasi ini didasarkan pada Tujuan 4 Target 4A Indikator nomor 35 SDGs.

4. Dimensi standar kualitas hidup

a) Akses sumber air minum

Indikator pertama pada dimensi standar kualitas hidup adalah sumber air minum yang digunakan. Rumah tangga dengan sumber air minum yang berasal dari sumur/mata air tak terlindung, sungai, dan lainnya, serta rumah tangga yang mengakses sumur bor/pompa dan sumur/mata air terlindung namun dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja kurang

dari 10 meter dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria ini sesuai dengan Tujuan 6 Target 6A Indikator nomor 50 SDGs.

b) Sanitasi

Indikator kedua pada dimensi standar kualitas hidup adalah sanitasi. Rumah tangga yang menggunakan fasilitas jamban bersama atau tidak ada jamban, serta rumah tangga yang meskipun menggunakan jamban sendiri atau bersama, namun tidak menggunakan kloset leher angsa atau tidak menggunakan tangki/SPAL sebagai tempat pembuangan akhirnya, dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria ini sesuai dengan Tujuan 6 Target 6A Indikator nomor 51 SDGs.

c) Akses sumber penerangan

Indikator ketiga pada dimensi standar kualitas hidup adalah sumber penerangan yang digunakan. Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan selain listrik PLN dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria ini sejalan dengan Tujuan 7 Target 7A Indikator nomor 56 SDGs.

d) Aset rumah

Indikator keempat pada dimensi standar kualitas hidup adalah aset rumah. Rumah tangga yang menempati rumah yang berstatus bukan rumah milik sendiri (kontrak/sewa) dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria ini mengacu pada standar rumah layak huni Kemenko PMK dan Kementerian PUPR.

e) Atap, lantai, dan dinding rumah

Indikator kelima pada dimensi standar kualitas hidup adalah atap, lantai, dan dinding rumah. Rumah tangga yang memenuhi minimal dua dari tiga kondisi berikut: (i) atap rumah terbuat dari ijuk/rambia/daun-daunan, dan lainnya; (ii) lantai rumah berjenis tanah dan lainnya; (iii) dinding rumah terbuat dari bambu dan lainnya, maka dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria deprivasi ini didasarkan pada salah satu kriteria rumah layak huni dari Kementerian PUPR.

Selanjutnya, tahapan penghitungan kemiskinan multidimensi (MPI) menurut Alkire-Foster (2011) adalah sebagai berikut.

1. Menentukan dimensi

Penentuan dimensi sangat penting dilakukan untuk melihat dimensi apa yang dianggap berpengaruh terhadap pembentukan MPI. Penentuan dimensi harus disertai argumentasi yang logis dan relevan dengan keadaan kemiskinan di masyarakat. Dalam kajian ini, ada empat dimensi yang digunakan, sebagaimana sudah diuraikan di atas.

2. Menentukan indikator

Indikator setiap dimensi dipilih dengan prinsip “accuracy” (untuk membuat data lebih akurat bisa menggunakan berbagai macam indikator yang

dibutuhkan sehingga mempunyai berbagai macam analisis untuk membuat pembuatan kebijakan menjadi lebih baik), tetapi juga “parsimony” (menggunakan sedikit mungkin indikator untuk mempermudah analisis kebijakan dan transparansi, sehingga bisa diambil kebijakan atau program prioritas). Ada 10 indikator yang digunakan dalam kajian ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

3. Menentukan bobot masing-masing dimensi dan indikator

Menurut metode AF, setiap dimensi MPI diberikan bobot dengan metode rata-rata, sehingga diperoleh nilai bobot yang sama untuk setiap dimensi. Selanjutnya, metode rata-rata juga digunakan untuk mendapatkan bobot masing-masing indikator pada setiap dimensi, sehingga setiap indikator dalam satu dimensi yang sama memiliki nilai bobot yang sama, namun bisa berbeda dengan indikator pada dimensi yang lain. Bobot masing-masing indikator dan dimensi dalam kajian ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Bobot Dimensi dan Indikator MPI

Dimensi	Bobot Dimensi	Indikator	Bobot Indikator
Ekonomi	1/4	Rata-rata konsumsi/ kapita/bln	1/4
Kesehatan	1/4	Gizi	1/8
		Penolong persalinan	1/8
Pendidikan	1/4	Partisipasi sekolah	1/8
		Pendidikan prasekolah	1/8
		Akses sumber air minum	1/20
Standar kualitas hidup	1/4	Sanitasi	1/20
		Akses sumber penerangan	1/20
		Aset rumah	1/20
		Atap, lantai, dinding rumah	1/20

4. Membuat *cut-off* pertama

Cut-off pertama dibuat untuk setiap indikator dan merupakan ambang batas minimum bagi setiap indikator sebagai penentu apakah suatu rumah tangga terdeprivasi pada indikator tersebut atau tidak. *Cut-off* masing-masing indikator sudah diuraikan sebelumnya.

5. Mengaplikasikan *cut-off* pertama
Setiap rumah tangga diberikan penilaian terhadap masing-masing indikator. Indikator yang terdeprivasi diberikan skor 1, sebaliknya indikator yang tidak terdeprivasi diberikan skor 0.

6. Menghitung jumlah deprivasi dari setiap rumah tangga
Formula penghitungan jumlah deprivasi (skor kemiskinan multidimensi) setiap rumah tangga:

$$C = \sum_{i=1}^{11} W_i I_i$$

dengan

$$\sum_{i=1}^{11} W_i = 1$$

di mana C adalah jumlah deprivasi (skor rumah tangga), W_i adalah bobot indikator i , dan I_i adalah skor indikator i (1 jika terdeprivasi dan 0 jika tidak).

7. Membuat *cut-off* kedua
Menurut metode AF, nilai *cut-off* ini adalah $1/3$ atau 0,333. *Cut-off* ini digunakan untuk menyaring skor rumah tangga pada tahap keenam di atas. Rumah tangga yang memiliki skor $1/3$ ke atas dikatakan miskin multidimensi. Sebaliknya, rumah tangga yang skornya kurang dari $1/3$ dikatakan tidak miskin multidimensi.
8. Mengaplikasikan *cut-off* kedua
Rumah tangga yang memiliki skor $C \geq 1/3$ (miskin multidimensi) diberikan sensor skor (C') sebesar C , sedangkan rumah tangga yang memiliki skor $C < 1/3$ (tidak miskin multidimensi) diberikan sensor skor (C') senilai 0
9. Menghitung jumlah rumah tangga dan penduduk yang miskin multidimensi
Rumah tangga yang miskin multidimensi diberikan kode 1, sedangkan rumah tangga yang tidak miskin multidimensi diberikan kode 0. Jumlah rumah tangga yang miskin multidimensi dalam suatu wilayah dilakukan dengan menjumlahkan kode seluruh rumah tangga di wilayah tersebut. Sedangkan untuk menghitung jumlah penduduk yang miskin multidimensi, jumlahkan seluruh anggota rumah tangga (ART) dari semua rumah tangga yang berkode 1.

10. Menghitung *headcount ratio* (H)
Formula penghitungan H adalah:

$$H = \frac{q}{n}$$

di mana q adalah banyaknya penduduk miskin multidimensi, dan n adalah total penduduk.

11. Menghitung intensitas kemiskinan multidimensi (A)
Formula penghitungan A adalah:

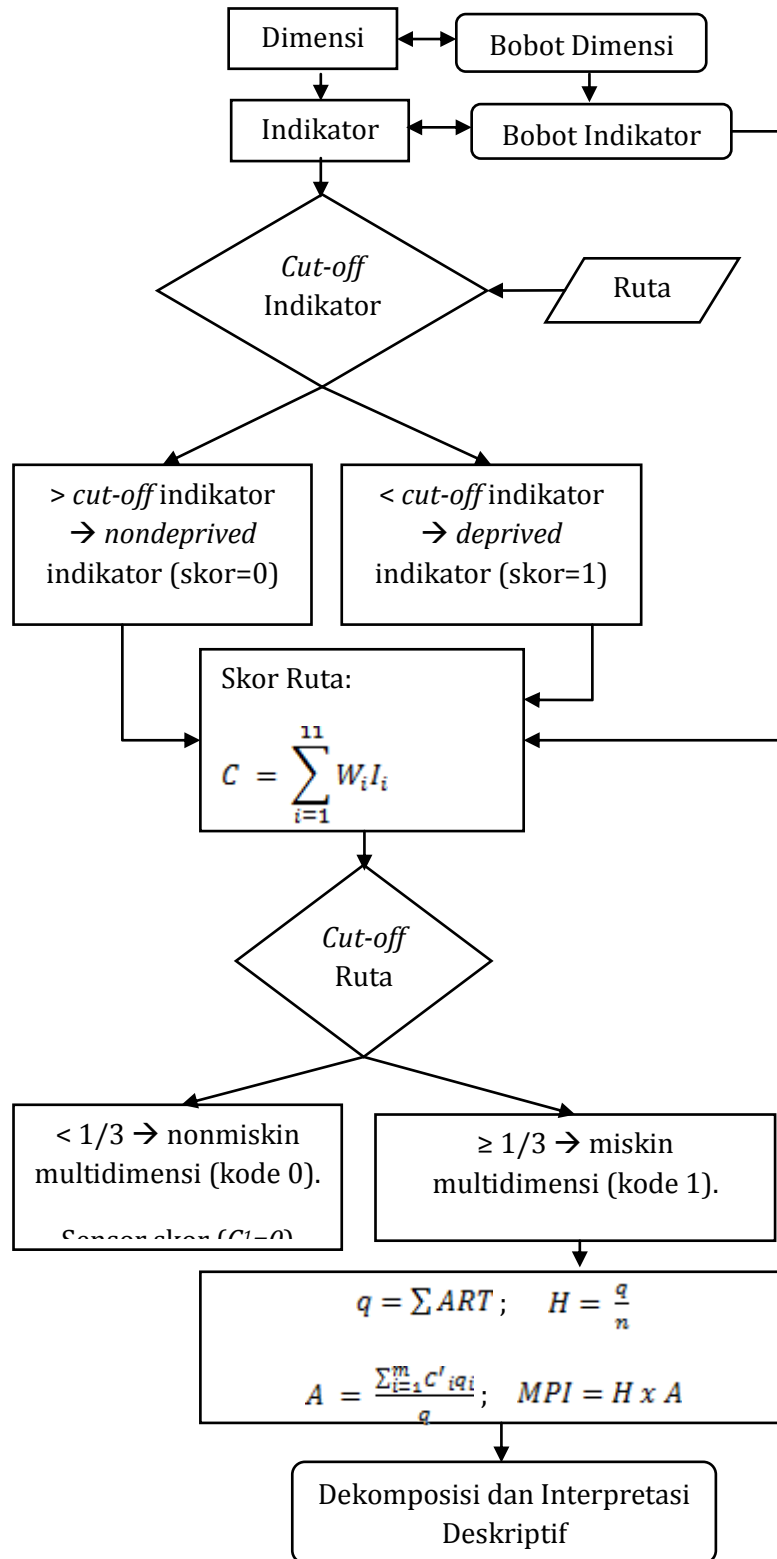
$$A = \frac{\sum_{i=1}^m C'_i q_i}{q}$$

di mana C'_i adalah sensor skor rumah tangga i ; q_i adalah banyaknya ART di rumah tangga miskin multidimensi i ; q adalah jumlah penduduk yang miskin multidimensi; dan m adalah banyaknya rumah tangga miskin multidimensi.

12. Menghitung indeks kemiskinan multidimensi (MPI)
Formula penghitungan MPI adalah:

$$MPI = H \times A$$

13. Mendekomposisikan angka kemiskinan multidimensi
Angka kemiskinan multidimensi dapat didekomposisikan dan dianalisis lebih lanjut menurut status daerah tempat tinggal rumah tangga (kota/desa), dan lain sebagainya sesuai kecukupan representasi estimasi data yang tersedia
14. Menginterpretasikan output hasil penghitungan kemiskinan multidimensi secara deskriptif disertai gambar (grafik) agar lebih jelas dan mudah dipahami.



Gambar 2 Alur Penghitungan Kemiskinan Multidimensi (Metode AF)

Kesimpulan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bukan hanya sekadar dipahami sebagai masalah perekonomian, akan tetapi lebih luas daripada itu, kemiskinan mencakup berbagai dimensi kehidupan. Oleh karenanya, indikator yang digunakan untuk mengukurnya seharusnya tidak hanya terpaku pada dimensi ekonomi, tetapi juga harus meliputi dimensi-dimensi lain. Dengan mengadopsi metode penghitungan MPI Alkire-Foster (2011) dan disesuaikan dengan cita-cita pembangunan dunia dalam SDGs, cita-cita pemerintah Indonesia, serta konteks daerah di Indonesia, maka dirumuskanlah dimensi, indikator, dan teknik penghitungan MPI dalam kajian ini.

Daftar Pustaka

- Alkire, Sabina dan James Foster. 2011. "Counting and Multidimensional Poverty Measurement". In *Journal of Public Economics* 95 (476-487)
- BPS. 2014. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: BPS
- Hanandita, Wulung dan Gindo Tampubolon. 2015. "Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003-2013)". In *Springer Soc Indic Res* DOI 10.1007/s11205-015-1044-0
- Perkumpulan Prakarsa. 2015. *Modul Pelatihan Perhitungan MPI Indonesia dan Penyusunan Laporan MPI Indonesia*. Jakarta: Prakarsa
- Ravallion, Martin. 1998. "Poverty Lines in Theory and Practice". In *Living Standards Measurement Study Working Paper* 133
- Sen, Amartya Kumar. 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc.